



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
TAHUN 2023**

**Sarilamak, September 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Perubahan Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian program dan kegiatan pada tahun perencanaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Dalam penyusunannya, perubahan Renja PD ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan aturan tentang Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya, kami berharap semoga Perubahan Renja PD Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya dan bermanfaat bagi yang memerlukannya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Sarilamak, September 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**RADIMAS, S.Pd**  
**NIP. 19650123 198903 1 003**



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
  - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA**

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022

TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Desember 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA</b>	
<b>NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	45
3.1 Indikator Kinerja	45
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	47
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	65
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota	35
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022	40
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	44
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Target Kinerja IKU Perangkat Daerah	45
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023	46
Tabel 3.3	Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja PD yang disusun setiap tahunnya dapat mengalami perubahan di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017, pasal 343 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, termasuk akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun tahapan penyusunan

perubahan Renja PD diatur dalam pasal 360 sampai dengan pasal 368 yang dimulai dari tahapan penyusunan rancangan perubahan Renja PD, selanjutnya rancangan akhir perubahan Renja PD dan terakhir penetapan perubahan Renja PD Rancangan.

Esensi dari rumusan perubahan Renja PD Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja PD sampai dengan triwulan II Tahun 2023. Disamping itu juga memperhatikan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6398);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
35. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 239 Tahun 2012;

36. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 53);
37. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 56);
38. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 71).
39. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
40. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk menyediakan dokumen perubahan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 yang menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sebagai acuan pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan**, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, analisis kinerja pelayan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, yang memuat indikator kinerja dan perubahan rencana kerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju tahun 2024.
- IV. Penutup**, berisikan uraian penutup.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II tahun 2023 dengan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang ditampung dalam APBD serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi Renja PD tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023 untuk mendapatkan target sasaran yang direncanakan oleh perangkat daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam Renstra perangkat daerah tahun 2021-2026.

Jumlah pagu Indikatif untuk program dan kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.055.993.922,-. Sedangkan pagu dana yang tertampung dalam APBD Pergeseran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.532.036.856,- yang terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan II (bulan Mei) tahun 2023 (tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota**  
**Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Periode Pelaksanaan: sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Indikator dan target kinerja OPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.782.000.755	100%	16.562.383.840	100%	4.532.036.856	12,81%	416.288.773	1,33%	1.058.137.048	-	-	14,14%	1.474.425.821	100,00%	18.036.809.661	33,33	25,48	DPK		
		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	61.781.850.755	100%	15.939.734.340	100%	2.405.005.765	38,43%	395.138.673	3,98%	610.555.008	-	-	42,41%	1.005.693.681	100,00%	16.945.428.021	33,33	27,43	DPK		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	1.087.594.000	100%	-	100%	12.499.700	50,00%	503.600	0,00%	7.165.000	-	-	50,00%	7.668.600	83,33%	7.668.600	41,67	0,71	DPK		
	Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	24 Dokumen	452.268.000	8 Dokumen	-	4 Dokumen	5.948.100	1 Dokumen	-	0 Dokumen	3.975.000	-	-	1 Dokumen	3.975.000	9 Dokumen	3.975.000	37,50	0,88	DPK		
		2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	6 Dokumen	121.990.000	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1.520.000	1 Dokumen	-	0 Dokumen	1.520.000	-	-	1 Dokumen	1.520.000	3 Dokumen	1.520.000	50,00	1,25	DPK		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
											I		II		III		IV										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13				14=13/5 x100%		15
		2.23.0 1.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	6 Doku men	130.180.000	2 Doku men	-	1 Doku men	-	0 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	-	0 Doku men	-	2 Doku men	-	33,33	-	DPK			
		2.23.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	6 Doku men	112.482.000	2 Doku men	-	1 Doku men	2.173.600	1 Doku men	503.600	0 Doku men	1.670.000	-	-	1 Doku men	2.173.600	3 Doku men	2.173.600	50,00	1,93	DPK				
		2.23.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	6 Doku men	131.592.000	2 Doku men	-	1 Doku men	-	0 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	0 Doku men	-	2 Doku men	-	33,33	-	DPK				
		2.23.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Doku men	139.082.000	2 Doku men	-	1 Doku men	2.858.000	1 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	1 Doku men	-	3 Doku men	-	50,00	-	DPK				
		2.23.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	19.341.144.655	100%	4.644.946.034	100%	2.044.459.630	34,09%	341.839.708	6,82%	523.908.158	-	-	40,91%	865.747.866	80,30%	5.510.693.900	40,15	28,49	DPK				
		2.23.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN pejabat penanggung awaban pengelola keuangan	150 ASN, 108 Peja bat	18.904.274.655	54 ASN, 20 Peja bat	4.644.946.034	29 ASN, 2 Peja bat	2.038.820.630	26 ASN, 0 Peja bat	339.701.708	0	523.509.158	-	-	26 ASN, 0 Peja bat	863.210.866	80 ASN, 20 Peja bat	5.508.156.900	53,33	29,14	DPK				

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
								I		II		III		IV			13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	14=13/5 x100%	15								
		2.23.0 1.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	72 doku men	212.020.000	24 doku men	-	12 doku men	3.864.000	3 doku men	363.000	2 doku men	399.000	-	-	5 doku men	762.000	29 doku men	762.000	40,28	0,36	DPK
		2.23.0 1.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	24 doku men	71.230.000	8 doku men	-	4 doku men	306.000	4 doku men	306.000	0 doku men	-	-	-	4 doku men	306.000	12 doku men	306.000	50,00	0,43	DPK
		2.23.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	6 Doku men	86.490.000	2 Doku men	-	1 Doku men	1.469.000	1 Doku men	1.469.000	0 Doku men	-	-	-	1 Doku men	1.469.000	3 Doku men	1.469.000	50,00	1,70	DPK
		2.23.0 1.2.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan	6 Doku men	25.400.000	2 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	1 Doku men	-	3 Doku men	-	50,00	-	DPK
		2.23.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD yang disiapkan	78 doku men	27.680.000	26 doku men	-	13 doku men	-	3 doku men	-	2 Doku men	-	-	-	5 doku men	-	31 doku men	-	39,74	-	DPK
		2.23.0 1.2.02 .08	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	6 Doku men	14.050.000	2 Doku men	-	1 Doku men	-	0 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	0 Doku men	-	2 Doku men	-	33,33	-	DPK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Perang gung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
		2.23.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	132.170.000	100%	-	100%	-	100%	-	0%	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	50,00	-	DPK
		2.23.0 1.2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	6 Doku men	90.540.000	2 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	-	1 Doku men	-	3 Doku men	-	50,00	-	DPK	
		2.23.0 1.2.03 .06	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	6 Doku men	41.630.000	2 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	0 Doku men	-	-	-	-	1 Doku men	-	3 Doku men	-	50,00	-	DPK	
		2.23.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.722.285.500	100%	-	100%	2.393.000	33,33%	309.000	0,00%	1.520.000	-	-	-	33,33%	1.829.000	77,78%	1.829.000	38,89	0,11	DPK	
		2.23.0 1.2.05 .01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9 unit	92.300.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-	DPK	
		2.23.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas (Kuning Khaki )	175 stel	483.913.500	0 stel	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	DPK	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13				14=13/5 x100%		15
				Jumlah kokarde pakaian dinas	110 buah		0 buah		0		0		0					0		0		0		-			
				Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Haria (hitam Putih)	60 stel		0		0 stel		0 stel		0 stel					0 stel		0 stel		0 stel		-			
				Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Haria (Pakaian Daerah)	195 stel		0		0		0		0					0		0		0		-			
				Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI	90 stel		0		0 stel		0 stel		0 stel					0 stel		0 stel		0 stel		-			
				Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Olah Raga	175 stel		0 stel		0		0		0					0		0		0		-			
	2.23.0 1.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	18 Doku men	141.750.000	6 Doku men	-	3 Doku men	2.393.000	1 Doku men	309.000	0 Doku men	1.520.000				1 Doku men	1.829.000	7 Doku men	1.829.000	38,89	1,29	DPK				
	2.23.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	58 Kali	286.994.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-				0 Kali	-	0 Kali	-	-	-	-	-	-	DPK	
	2.23.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	36 Kali	717.328.000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-				0 Kali	-	0 Kali	-	-	-	-	-	-	DPK	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13				14=13/5 x100%		15	
		2.23.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	347,7 80 Lemb ar, 360 Buah, 320 buku, 146 meter	253.492.500	55.62 0 Lemb ar, 108 Buah, 40 buku, 12 meter	22.882.800	15.00 0 Lemb ar, 16 Buah, 20 buku, 12 meter	6.600.000	1400 Lemb ar, 8 Buah, 10 buku, 0 meter	1.094.000	2000 Lemb ar, 9 Buah, 5 buku, 0 meter	1.041.000						3400 Lemb ar, 17 Buah, 15 buku, 0 meter	2.135.000	59020 Lemb ar, 125 Buah, 55 buku, 18 meter	25.017.800	16,97	9,87	DPK		
		2.23.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)	60 bulan	72.000.000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-						0 bulan	-	0 bulan	-	-	-			
		2.23.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	5150 porsi makan, 5150 porsi minum	141.625.000	550 porsi makan, 550 porsi minum	15.125.000	100 porsi makan, 100 porsi minum	3.500.000	0 porsi makan, 0 porsi minum	-	0 porsi makan, porsi minum	-						0 porsi makan, 0 porsi minum	-	550 porsi makan, 550 porsi minum	15.125.000	10,68	10,68	DPK		
		2.23.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5300 porsi makan, 5300 porsi minum, 335 kali	1.265.455.000	700 porsi makan, 700 porsi minum, 55 kali	157.231.394	200 porsi makan, 200 porsi minum, 7 kali	20.314.435	40 porsi makan, 40 porsi minum, 0 kali	1.100.000	20 porsi makan, 20 porsi minum, 2 kali	14.126.920						60 porsi makan, 60 porsi minum, 2 kali	15.226.920	760 porsi makan, 760 porsi minum, 57 kali	172.458.314	14,34	13,63	DPK		
		2.23.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 bulan	88.234.000	0 bulan	-	12 bulan	4.122.800	3 bulan	262.800	2 bulan	-						5 bulan	262.800	5 bulan	262.800	6,94	0,30	DPK		







No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
		2.23.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31 Unit	2.202.695.000	10 Unit	101.031.135	2 Unit	13.465.000	1 Unit	3.000.000	0 Unit	3.992.200					1 Unit	6.992.200	11 Unit	108.023.335	35,48	4,90	DPK
		2.23.0 1.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	6 unit	25.000.000	0 unit	-	0	-	0	-	0						0	-	0	-	0	-	DPK
		2.23.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165 unit	155.225.000	9 unit	6.070.600	3 unit	2.030.000	1 Unit	610.000	0 Unit						1 Unit	610.000	10 unit	6.680.600	6,06	4,30	DPK
		2.23.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	4 unit	237.464.000	1 unit	4.712.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit						0 unit	-	1 unit	4.712.000	25,00	1,98	DPK
		2.23.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	2 unit	1.600.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit						0 unit	-	0 unit	-	0	-	DPK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		14=13/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
		2.23	<b>URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERPUS TAKAAN</b>			5.415.360.000		348.958.400		2.112.353.591		21.150.100		432.904.540		-		-		454.054.640		803.013.040		14,83	DPK
		2.23.0 2	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTA KAAN</b>	<b>Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina</b>	46,4 0%	4.378.140.000		330.053.700	7,49%	2.028.658.091	1,73%	18.671.500	1,44%	430.724.540		-		-	3,17%	449.396.040	14,41%	779.449.740	14,41 %	17,80	DPK
Terw ujudn ya Perp ustak aan Sesu ai Stan dar Nasi onal dan Berb asis Inklu si Sosi al untuk Mem perku at		2.23.0 2.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah perpustaka an yang dikelola di tingkat daerah kabupaten</i>	156 perp ustak aan	2.300.640.200	39 perpu staka an	159.598.500	26 perpu staka an	988.629.941	6 perpu staka an	5 perpu staka an	5.809.000	5 perpu staka an	359.236.020	-	-	-	11 perpu staka an	365.045.02 0	50 perpu staka an	524.643.520	32,05	22,80	DPK
			<i>Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustak aan daerah</i>	16.3 62 judul/ 38.3 16 ekse mplar	14704 judul/ 23.51 3 ekse mplar		14.40 7 judul/ 28.31 6 ekse mplar	14704 judul/ 23.51 3 ekse mplar	14704 judul/ 23.51 3 ekse mplar		14704 judul/ 23.51 3 ekse mplar	61,37													
			<i>Jumlah Pustakawan / pengelola perpustaka an yang bersertifikat</i>	9 oran g	1 orang		3 orang	1 orang	6 orang		7 orang	8 orang		11,11											

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Budaya Literasi	2.23.0 2.2.01 .01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Dikembangkan Manajemen Berbasis ISC Information Service Managemen	NA	-	NA	-	5 Layanan	312.350.000	5 Layanan	600.000					5 Layanan	297.606.000	5 Layanan	297.606.000	100,00	#DIV/0!	DPK		
		2.23.0 2.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan dikembangkan Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0, Pustaka nagari = 60, tbn = 3 (64 perpustakaan)		217.249.000	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0, Pustaka nagari = 54, tbn = 1 (57 perpustakaan)	20.070.000	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0, Pustaka nagari = 12, tbn = 0 (65 perpustakaan)	20.225.500	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0, Pustaka nagari = 1 tbn = 1 (3 perpustakaan)	400.000					Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0, Pustaka nagari = 4 tbn = 1 (6 perpustakaan)	2.970.000	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0, Pustaka nagari = 56, tbn = 2 (59 perpustakaan)	23.040.000	92,19	10,61	DPK		
		2.23.0 2.2.01 .03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi Bahan pustaka khas perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten	25 judul/ 500 examplar	228.799.950	0	-	3 judul/ 580 examplar	179.404.500	0 judul/ 0 examplar	950.000					0 judul/ 0 examplar	2.595.000	0 judul/ 0 examplar	2.595.000	0	1,13	DPK		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
		2.23.0 2.2.01 .04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	26 perpustakaan	439.377.600	39 perpustakaan	60.758.400	26 perpustakaan	170.489.691	3 perpustakaan	2.159.000	2 perpustakaan	52.305.020					5 perpustakaan	54.464.020	44 perpustakaan	115.222.420	169,23	26,22	DPK
				Jumlah event perlombaan perpustakaan sekolah	3 kali		0 kali		2 kali		0 kali		0 kali					0 kali		0 kali		0			
		2.23.0 2.2.01 .06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga perpustakaan/ pustakawan yang dilatih	270 orang	392.000.000	0 orang	-	30 orang	34.066.000	0 orang	300.000	0 orang	1.520.000					0 orang	1.820.000	0	1.820.000	0	0,46	DPK
		2.23.0 2.2.01 .07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka model	18 sekolah	260.000.000	3 sekolah	-	3 sekolah	40.104.250	3 sekolah	1.100.000	0 sekolah	2.670.000					3 sekolah	3.770.000	3 sekolah	3.770.000	16,67	1,45	DPK
		2.23.0 2.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan daerah	3195 judul/ 1617 6 eksemplar	763.213.650	286 judul/ 976 eksemplar	78.770.100	500 judul/ 2000 eksemplar	231.990.000	0 judul/ 0 eksemplar	300.000	0 judul/ 0 eksemplar	1.520.000					0 judul/ 0 eksemplar	1.820.000	0 judul/ 0 eksemplar	80.590.100	6,39	10,56	DPK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15					
		2.23.0 2.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.586 pengunjung	2.077.499.800	4.828 pengunjung	170.455.200	2.473 pengunjung	1.040.028.150	2242 pengunjung	12.862.500	153 pengunjung	71.488.520					2395 pengunjung	84.351.020	2395 pengunjung	254.806.220	92,61	12,27	DPK					
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	13,25%	48,48%		48,48%		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A			N/A	N/A	48,48%	48,48	
		2.23.0 2.2.02 .01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah kunjungan pustaka keliling ke satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	330 x kunjungan	1.037.327.300	87 x kunjungan	61.232.500	50 x kunjungan	252.473.700	28 x kunjungan	7.450.000	0 x kunjungan	64.205.000					28 x kunjungan	71.655.000	115 x kunjungan	132.887.500	34,85	12,81	DPK					
			Jumlah event perlombaan budaya baca dan literasi	19 Kali	1 Kali		3 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali		0 Kali		0 Kali			0 Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali	5,26
			Jumlah publikasi dan sosialisasi budaya baca dan literasi	19 Kali	1 Kali		3 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali		0 Kali		0 Kali			0 Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali	5,26

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
											I		II		III		IV										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13				14=13/5 x100%		15
		2.23.0 2.2.02 .02	Pembangu nan dan Pemelihara an Sarana Perpustaka an di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka yang mendapat bantuan dan pemelihar aan sarana perpustak aan di tempat umum	12 perpu staka aan	319.042.500	2 perpu staka aan	54.457.000	1 perpu staka aan	633.897.500	0 perpu staka aan	-	0 perpu staka aan	-					0 perpu staka aan	-	2 perpu staka aan	54.457.000	16,67	17,07	DPK		
		2.23.0 2.2.02 .04	Pengemban gan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah masyarak at yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustak aan berbasis inklusi sosial	360 oran g	376.130.000	195 oran g	54.765.700	207 oran g	100.359.750	30 oran g	5.412.500	20 oran g	7.283.520					50 oran g	12.696.020	245 oran g	67.461.720	68,06	17,94	DPK		
		2.23.0 2.2.02 .05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten/ Kota	4 kegia tan	345.000.000	0	-	1 Kegiat an	53.297.200	0	-	1 Kegiat an	-					1 Kegiat an	-	1 Kegiat an	-	25	-	DPK		
		2.23.0 3	<b>PROGRAM PELESTA RIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan</b>	<b>100%</b>	<b>1.037.220.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.904.700</b>	<b>100%</b>	<b>83.695.500</b>	<b>0%</b>	<b>2.478.600</b>	<b>0%</b>	<b>2.180.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.658.600</b>	<b>50,00%</b>	<b>23.563.300</b>	<b>50,00</b>	<b>2,27</b>	<b>DPK</b>				



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					I	II	III	IV	9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.23.0 3.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Persentas e Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmed iakan	100%	1.037.220.000	100%	18.904.700	100%	83.695.500	0%	2.478.600	0%	2.180.000	-	-	0%	4.658.600	100%	23.563.300	33,33	2,27			DPK
		2.23.0 3.2.01 .01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dirawat, dilestarikan dan didaftarkan	12 naskah	556.180.000	4 naskah	18.904.700	2 naskah	61.754.900	0 naskah	600.000	0 naskah	820.000			0 naskah	1.420.000	4 naskah	20.324.700	33,33	3,65			DPK
		2.23.0 3.2.01 .02	Pengembanga , Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunaka	Jumlah dokumen naskah kuno yang dikembang kan, diolah dan dialihmediak an untuk dilestarikan dan didayagunak an daerah	10 naskah	481.040.000	0 naskah	-	2 naskah	21.940.600	0 naskah	1.878.600	0 naskah	1.360.000			0 naskah	3.238.600	0 naskah	3.238.600	0	0,67			DPK
		2.24	URUSAN Pemerintah AN BIDANG KEARSIPAN			3.584.790.000		273.691.100		14.677.500		-		14.677.500		-		14.677.500		288.368.600		8,04			DPK
	Terw ujudn ya Peny eleng gara an Kear sipan	2.24.0 2	PROGRAM PENGELO LAAN ARSIP	Persenta se OPD/ Nagari yang menerap kan arsip secara baku	100%	1.938.250.000	34,43%	172.385.900	53,28%	10.077.500	0,00%	-	0,82%	10.077.500	-	-	0,00%	10.077.500	34,43%	182.463.400	34,43	9,41			DPK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	yang Akun tabel	2.24.0 2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	44 Unit	820.740.000	8 Unit	79.732.350	2 Unit	10.077.500	0 Unit	-	1 Unit	10.077.500	-	-	0 Unit	10.077.500	8 Unit	89.809.850	18,18	10,94	DPK		
		2.24.0 2.2.01 .01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah unit penataan arsip/dok umen daerah	44 unit	270.516.200	8 unit	39.358.000	2 unit	8.257.500	0 unit	-	1 unit	8.257.500			0 unit	8.257.500	8 unit	47.615.500	18,18	17,60	DPK		
		2.24.0 2.2.01 .02	Pemelihara an dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peraturan penyusutan arsip	27 Perat uran	286.683.800	10 Peratur an/draf perbup	40.374.350	1 draft peratu ran	1.820.000	0 draf perbup	-	1 draft peratu ran	1.820.000			0 draf perbup	1.820.000	10 draf perbup	42.194.350	37,04	14,72	DPK		
		2.24.0 2.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD/ Nagari yang dilakukan pengawa san penyelen ggaraan kearsipan	61 OPD/ Nagari	263.540.000	0	-	43 OPD/ Nagari	-	0 OPD/ Nagari	-	0 OPD/ Nagari	-	-	-	0 OPD/ Nagari	-	0	-	0	-	DPK		
		2.24.0 2.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	27 unit	114.190.000	2 unit	7.130.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-	0 unit	-	2 unit	7.130.000	7,41	6,24	DPK		
		2.24.02.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah unit arsip yang diakuisisi	27 unit	114.190.000	2 unit	7.130.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-	0 unit	-	2 unit	7.130.000	7,41	6,24	DPK		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
				Jumlah pengguna akses arsip statis per tahun	6 Pengguna		0 Pengguna		0 Pengguna		0 Pengguna		0 Pengguna					0 Pengguna		0 Pengguna		0,00			
		2.24.0 2.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Penerapan e-Arsip Terintegrasi	1 Instansi	1.003.320.000	1 Instansi	85.523.550	1 Instansi	-	0 Instansi	-	0 Instansi	-	-	-	0 Instansi	-	1 Instansi	85.523.550	33,33	8,52	DPK		
		2.24.0 2.2.03 .01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	1 kali	509.320.000	1 kali	22.768.500	1 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	-	-	0 kali	-	1 kali	22.768.500	33,33	4,47	DPK		
				Jumlah arsip yang masuk dalam JIKN	74 arsip		0 arsip		0 arsip		0 arsip		0 arsip				0 arsip		0 arsip		0				

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	14=13/5 x100%	15										
		2.24.0 2.2.03 .02	Pemberday aan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten yang dibina, dievaluasi dimonitorin g dan diawasi	40	494.000.000	32 Unit	62.755.050	35 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0 Unit	32 Unit	62.755.050	74,42	12,70	DPK							
				Jumlah event perlomba an kearsipan	6		0 kali		0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0											
		2.24.0 3	<b>PROGRAM PERLINDU NGAN DAN PENYELA MATAN ARSIP</b>	<b>Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindung an dan penyelama tan arsip</b>	100 %	1.536.690.000	100%	101.305.200	100%	4.600.000	0%	-	50%	4.600.000	-	-	0%	4.600.000	66,67%	105.905.200	33,33	6,89	DPK		
		2.24.0 3.2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)</i>	<i>Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah</i>	19 unit	236.121.000	5 unit	19.671.800	1 unit	2.680.000	0 unit	-	1 unit	2.680.000	-	-	0 unit	2.680.000	5 unit	22.351.800	26,32	9,47	DPK		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	14=13/5 x100%	15										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
			Tahun																						
		2.24.0 3.2.01 .01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip usul musnah	19 unit	142.862.000	5 unit	11.283.800	1 unit	2.680.000	0 unit	-	1 unit	2.680.000					0 unit		5 unit	11.283.800	26,32	7,90	DPK
		2.24.0 3.2.01 .02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip musnah	19 unit	93.259.000	5 unit	8.388.000	1 unit	-	0 unit	-	0 unit	-					0 unit		5 unit	8.388.000	26,32	8,99	DPK
		2.24.0 3.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/ Kota	Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamata n arsip	40 instansi	629.455.000	12 instansi	35.011.900	6 instansi	1.670.000	0 instansi	-	6 instansi	1.670.000					0 instansi	1.670.000	12 instansi	36.681.900	30,00	5,83	DPK
		2.24.0 3.2.02 .01	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan Evakuasi dan identifikasi i arsip akibat bencana	4 Kegiatan	354.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	DPK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
					I	II	III	IV	9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		14=13/5 x100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.24.0 3.2.02 .02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan penyelam atan pemulih an dan penyimp nan arsip akibat bencana	6 Kegi atan	275.455.000	2 Kegi atan	35.011.900	1 Kegi atan	1.670.000	0 Kegi atan	-	1 Kegi atan	1.670.000			0 Kegi atan	1.670.000	2 Kegi atan	36.681.900	33,33	13,32			DPK
		2.24.0 3.2.03	Penyelamat an Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan dimekarkan yang terselamatk an	6 unit	79.816.000	2 unit	7.622.000	1 unit	250.000	0 unit	-	1 unit	250.000			0 unit	250.000	2 unit	7.872.000	33,33	9,86			DPK
		2.24.0 3.2.03 .01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabung an Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit arsip bernilai dari perangkat daerah yang digabung kan	6 unit	79.816.000	2 unit	7.622.000	1 unit	250.000	0 unit	-	1 unit	250.000			0 unit	250.000	2 unit	7.872.000	33,33	9,86			DPK
		2.24.0 3.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	22 kegia tan	591.308.000	6 kegi atan	38.999.500	2 kegi atan	-	0 kegi atan	-	0 kegi atan	-			0 kegi atan	-	6 kegi atan	38.999.500	27,27	6,60			DPK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15								
		2.24.0 3.2.05 .01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian dan penilaian arsip statis yang dinyatakan hilang	6 kegia tan	296.970.000	2 kegia tan	16.755.000	1 kegia tan	-	0 kegia tan	-	0 kegia tan	-							2 kegia tan	16.755.000	33,33	5,64	DPK								
		2.24.0 3.2.05 .02	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	16 kegia tan	294.338.000	4 kegia tan	22.244.500	1 kegia tan	-	0 kegia tan	-	0 kegia tan	-							4 kegia tan	22.244.500	25	7,56	DPK								
		<b>2.24.0 4</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNA AN ARSIP</b>	<b>Persentase Regulasi Izin Pengguna an arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten</b>	<b>100 %</b>	<b>109.850.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>							<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	DPK								
		2.24.0 4.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	109.850.000	0 SOP	-	1 SOP	-	0 SOP	-	0 SOP	-							0 SOP	-	0 SOP	-	0	-	DPK						
		2.24.0 4.2.01 .01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	109.850.000	0 SOP	-	1 SOP	-	0 SOP	-	0 SOP	-							0 SOP	-	0 SOP	-	0	-	DPK						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat kinerja																																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
											I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD kabupaten/kota berikutnya*:																									



Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota capaian realisasi fisik sebesar 42,41% dan realisasi keuangan sejumlah Rp. 1.005.693.681,-.
2. Program Pembinaan Perpustakaan realisasi keuangan baru mencapai Rp. 449.396.040,- dengan realisasi fisik sebesar 3,17 %.
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno capaian realisasi keuangannya sejumlah Rp. 4.658.600,- dan realisasi fisik belum ada.
4. Program Pengelolaan Kearsipan capaian realisasi keuangannya sejumlah Rp. 4.658.600,- dan realisasi fisik belum ada.
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip capaian realisasi keuangannya sejumlah Rp. 785.000,- dan realisasi fisik belum ada.
6. Sebagai catatan pada urusan kearsipan terdapat 3 program yaitu Program Pengelolaan Kearsipan, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dan Program Perizinan Penggunaan arsip dimana realisasi keuangannya sejumlah Rp. 14.677.500,- atau (100%), Rendahnya jumlah anggaran pada Urusan kearsipan disebabkan oleh program tersebut tidak termasuk dalam Dana Alokasi Umum yang diarahkan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), standar pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Oleh karena OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bukan merupakan OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Berdasarkan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>XVII</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>											
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	IKD	2.400	2.436	2.473	2.510	2.349	4.828	6.020	6.800	Melebihi dari target yang ditetapkan
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	IKD	22.816	25.416	28.316	31.416	23.345	23.513	25.513	26.416	Tidak adanya belanja modal pengadaan buku pada tahun 2022
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	-	IKD	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,06	1,00	1,00	Rasio perpustakaan persatuan penduduk lebih rendah dari target yang ditetapkan
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	-	IKD	0,80	0,80	0,81	0,82	0,61	1,25	0,81	0,82	Melebihi dari target yang ditetapkan
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	-	IKD	13.337	13.842	14.407	15.012	14.122	14.704	15.204	15.657	Melebihi dari target yang ditetapkan
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	IKD	1	1	3	6	1	1	7	9	100% (Realisasi sama dengan target yang ditetapkan) tahun 2022 dan melebihi target tahun 2023
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	IKD	8.30	9,28	10,25	11,00	-	48,48	48,48	48,48	Pada tahun 2022 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah 48,48. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 9,28 maka capaiannya adalah sebesar 522,41 %. Sangat Tingginya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												<p>Masyarakat ini disebabkan oleh berubahnya parameter pengukuran Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat dari 3 parameter menjadi 5 parameter dan adanya strategi kebijakan dalam peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat.</p> <p>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat merupakan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur 5 parameter yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Frekuensi membaca per minggu (kali),</li> <li>2.Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam),</li> <li>3.Banyaknya bahan bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul),</li> <li>4.Frekuensi Akses Internet, dan</li> <li>5.Durasi Akses Internet</li> </ol> <p>Oleh sebab itu untuk realisasi dan proyeksi tahun 2023, 2024 dan 2025 diperkirakan sama dengan realisasi tahun 2022</p>
8	<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>	-	IKD	2,5	3	3,5	4	7,52	56,74	56,74	56,74	<p>Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah 56,74. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 3, maka capaiannya adalah sebesar 1891,33%. Sangat tingginya capaian ini disebabkan terdapat perbedaan formula perhitungan sejumlah unsur pembangunan</p>

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												literasi masyarakat saat menetapkan target dengan formula perhitungan realisasinya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), yaitu : 1.UPLM = Pemerataan layanan perpustakaan 2.UPLM 2 = Ketercukupan koleksi 3.UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan 4.UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan 5.UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP 6.UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan 7.UPLM 7 = Anggota Perpustakaan Oleh sebab itu untuk realisasi dan proyeksi tahun 2023, 2024 dan 2025 diperkirakan sama dengan realisasi tahun 2022
<b>XVIII</b>	<b>KEARSIPAN</b>	-										
1	<b>Persentase OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku</b>	-	IKD	24,54	29,54	34,54	39,54	32,79	34,43	35,24	35,24	Lebih rendah dari target yang ditetapkan karena tidak tersedianya anggaran yang memadai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	<b>Peningkatan SDM pengelola kearsipan</b>	-	IKD	30	60	60	60	65	50	5	60	Sama dengan target yang ditetapkan
3	<b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</b>	-	IKD	43,00	55,00	60,00	64,00	51,75	52,94	52,94	52,94	Lebih rendah dari target yang ditetapkan karena Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN masih bernilai nol. Kita masih dalam proses untuk memperoleh akses SIKN dari ANRI
4	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	-	IKD	35,00	40,00	55,00	59,00	37,50	27,22	18,33	18,33	Lebih rendah dari target yang ditetapkan karena Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK dan Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK belum terlaksana sehingga nilainya masih nol.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap *stakeholders*;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap *stakeholders* sudah cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja sasaran pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>1</b>	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan public	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	83,39
			Nilai AKIP	64,37 (B)	74,70 (BB)
			Nilai IRB	53,33 (CC)	Dalam proses penilaian inspektorat
<b>2</b>	Membangun budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	9,28	48,48
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3	56,74
<b>3</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	55,00	52,94



			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	40,00	27,22

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat lebih rendah dari target yang ditetapkan, disebabkan oleh factor eksternal dan factor internal.

Adapun permasalahan dan hambatan secara umum yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan perpustakaan dan kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya kompetensi pengelola perpustakaan di sekolah/nagari;
- b. Kriteria sarana dan prasarana pendukung gedung perpustakaan daerah belum sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Lembaga Perpustakaan Nasional;

- c. Penambahan koleksi buku pertahun belum dapat mencapai jumlah yang ditetapkan standar nasional yaitu 0,025 perkapita pertahun (minimal 7.420 judul pertahun);

## 2. Kearsipan

- a. Belum adanya gedung untuk Depo Arsip dan kantor arsip sesuai standar yang tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip in aktif dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depo Arsip.
- b. Masih rendahnya kesadaran penyelenggaraan arsip yang baik di lingkungan pemerintahan daerah karena belum memahami arti penting dan peran strategis arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan semua aspek kehidupan masyarakat.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan berupa fungsional Arsiparis dan atau fungsional umum pengelola arsip, baik di Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) maupun di seluruh Unit Pengelola Kearsipan (seluruh OPD, Nagari, RSUD, BUMD dll); dan
- d. Masih terbatasnya sarana kerja untuk pengelolaan arsip.

Permasalahan dan hambatan di atas disadari dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional. Terhadap visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian dari pencapaian misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya saing Berlandaskan Keimanan” dan misi ke-4 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”. Sedangkan terhadap keberhasilan capaian program nasional/internasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu instansi pendukung tujuan yang hendak dicapai dalam SDGs yaitu tujuan ke-4 “menjamin kualitas pendidikan (*Quality Education/pendidikan yang bermutu dan berkualitas*) yang adil dan

inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua”.

Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke depannya antara lain :

1. Pemenuhan NSPK yang ditetapkan oleh Lembaga Perpustakaan Nasional RI terhadap penambahan koleksi perpustakaan yaitu sekurang-kurangnya 0,025 perkapita jumlah penduduk di wilayah kabupaten yang bersangkutan (minimal 7.420 judul pertahun).
2. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah perpustakaan khusus, perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan rumah ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Masih rendahnya apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (*memory of nation*) dan dokumen arsip yang memiliki nilai sangat berharga.
4. Masih rendahnya animo masyarakat untuk mengunjungi arsip daerah.
5. Harapan adanya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial guna peningkatan sumberdaya manusia dan perekonomian masyarakat.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis dan berbasis inklusif sosial;
2. Lahirnya Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan sebagai dasar hukum untuk bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan penataan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
3. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan kearsipan berupa e-SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dari Lembaga ANRI dan *inlistlite* dari Lembaga Pusnas.

4. Pemanfaatan web OPD sebagai sarana publikasi dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara online yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Berdasarkan permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang di atas selanjutnya diformulasi isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
2. Peningkatan budaya literasi berbasis inklusi sosial.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
4. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Penelusuran naskah kuno sebagai warisan budaya (*memory of nation*) serta pengumpulan dokumen arsip yang memiliki nilai sangat berharga.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan berbagai tahapan perencanaan dengan membuka saluran informasi ke berbagai komponen masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang di dalam tahapan perencanaan itu kemudian dianalisis dan dilakukan penelaahan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023.

Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten yang difasilitasi oleh Bapelitbang sampai bulan Februari 2022 **tidak** terdapat program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan/*stakeholders*, baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun asosiasi-asosiasi serta DPRD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					
2					
3					

N I H I L

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan dan menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam tahun berjalan, dapat terjadi perubahan target kinerja berdasarkan pengendalian dan evaluasi atau keadaan darurat yang menyebabkan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya tidak memungkinkan akan tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Sehubungan hal tersebut, perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2** berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Target Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	Target Capaian		Ket.
			Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97	89,97	Tidak Berubah
2	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	10,25	10,25	Tidak Berubah
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,5	3,5	Tidak Berubah
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	60,00	60,00	Tidak Berubah
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	55,00	55,00	Tidak Berubah

**Tabel 3.2**  
**Perubahan Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target		Ket.
			Renja 2022	Perubahan Renja 2022	
<b>XVI</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2.473	2.473	Tidak Berubah
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	28.316	28.316	Tidak Berubah
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,00	1,00	Tidak Berubah
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	%	0.81	0.81	Tidak Berubah
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	14.407	14.407	Tidak Berubah
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	3	Tidak Berubah
7.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	10,25	10,25	Tidak Berubah
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	3,5	3,5	Tidak Berubah
<b>XVII</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
1.	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	%	34,54	34,54	Tidak Berubah
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	60	60	Tidak Berubah
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	60,00	60,00	Tidak Berubah
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	55,00	55,00	Tidak Berubah

Dari tabel **Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2** di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

### **3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Perubahan Renja PD Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka disusun rekapitulasi kebutuhan dana/ pagu indikatif perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2023 pada tabel 3.3 berikut ini.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 ini adalah rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan yang dituangkan di dalam Renja PD merupakan penggalan dari Renstra untuk tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja PD dimaksud dapat dilakukan perubahan di tahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen Renja PD yang telah diatur didalam Permendagri tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka perubahan Renja PD Tahun 2023 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun perubahan perencanaan penganggaran dalam bentuk perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023, perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 serta pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2023.

Berkaitan dengan hal di atas serta untuk menjamin terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun 2023 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan OPD yang dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka menyelenggarakan kewajiban pemerintahan daerah khususnya dalam urusan perpustakaan dan kearsipan.
2. Perubahan Renja PD Tahun 2023 merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2023.

3. Perubahan Renja PD Tahun 2023 merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun perubahan RKA Tahun 2023 dan perubahan RAPBD Tahun 2023.
4. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala Dinas beserta seluruh unsur pimpinan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Evaluasi pelaksanaan perubahan Renja PD Tahun 2023 dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan perubahan Renja PD terhadap indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau survei yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Disamping beberapa kaidah yang dirumuskan diatas, maka untuk kesuksesan pelaksanaan perubahan Renja PD Tahun 2023 juga diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh *stakeholders* yang berkepentingan dalam melestarikan dan menyelamatkan arsip bernilai sebagai memori kolektif bangsa serta memajukan budaya literasi di Kabupaten Lima puluh Kota.

Demikian perubahan Renja PD Tahun 2023 disusun, semoga seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam perubahan Renja PD ini dapat diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat bermanfaat bagi daerah.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal September 2023  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**RADIMAS, S.Pd**  
NIP. 19650123 198903 1 003